

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017**

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017



Jalan Pemuda No. 64 Kav 16-17 Rawamangun Jakarta Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 31 Desember 2017
Kepala,

Dr. Hermansyah ,SH,MM
NIP. 19580917 198303 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Telah Direviu	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan	1
I Laporan Realisasi Anggaran	3
II Neraca	4
III Laporan Operasional	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas	6
V Catatan atas Laporan Keuangan	7
A Penjelasan Umum	7
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	15
B.1 Pendapatan	15
B.2 Belanja	16
B.2.1 Belanja Pegawai	17
B.2.2 Belanja Barang	17
B.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18
B.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19
B.2.5 Belanja Modal Lainnya	19
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	20
C.1 Aset Lancar	20
C.1.1 Bagian Lancar Tuntutan Tagihan Perbendaharaan/TGR	20
C.1.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	20
C.1.3 Persediaan	20
C.2 Aset Tetap	21
C.2.1 Tanah	21
C.2.2 Peralatan dan Mesin	21
C.2.3 Gedung dan Bangunan	22
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	23
C.2.5 Aset Tetap Lainnya	24
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	24
C.3 Aset Lainnya	25
C.3.1 Aset Lain-lain	25
C.3.2 Aset Tak Berwujud	25

C.3.3	Akumulasi Penyusutan Lainnya	26
C.4	Kewajiban Jangka Pendek	26
C.4.1	Utang kepada Pihak Ketiga	26
C.4	Ekuitas	27
C.4.1	Ekuitas	27
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	28
D.2	Beban Pegawai	28
D.3	Beban Persediaan	29
D.4	Beban Barang dan Jasa	29
D.5	Beban Pemeliharaan	30
D.6	Beban Perjalanan Dinas	31
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31
D.8	Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	32
D.9	Surplus /Defisit dari kegiatan Non Operasional	33
D.10	Surplus / Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	33
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
E.1	Ekuitas Awal	34
E.2	Surplus/Defisit-LO	34
E.3	Penyesuaian Nilai Aset	34
E.4	Koreksi Nilai Persediaan	34
E.5	Selisih revaluasi aset tetap	34
E.6	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	34
E.7	Transaksi Antar Entitas	34
E.8	Ekuitas Akhir	35
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	36
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	36
F.2	Pengungkapan Lain-lain	36

Lampiran

		DAFTAR TABEL
Tabel 1	: Daftar Penyisihan Piutang	11
Tabel 2	: Daftar Masa Manfaat Aset Tetap	13
Tabel 3	: Daftar Perubahan Revisi	15
Tabel 4	: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	15
Tabel 5	: Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	16

Tabel 6	: Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017	16
Tabel 7	: Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017	17
	dan 31 Desember 2016	
Tabel 8	: Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan	17
	31 Desember 2016	
Tabel 9	: Perbandingan Belanja Barang	18
	per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	
Tabel 10	: Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18
	per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	
Tabel 11	: Perbandingan Belanja Modal Gedung dan	19
	per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	
Tabel 12	: Perbandingan Belanja Modal Lainnya	19
	per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	
Tabel 13	: Perbandingan Persediaan	21
Tabel 14	: Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2017	21
Tabel 15	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	24
Tabel 16	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	26
Tabel 17	: Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga	26
	per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	
Tabel 18	: Perbandingan PNBP Lainnya	28
	per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	
Tabel 19	: Perbandingan Beban Pegawai	28
	per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	
Tabel 20	: Perbandingan Beban Persediaan	29
	per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	
Tabel 21	: Perbandingan Beban Barang dan Jasa	29
	per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	
Tabel 22	: Perbandingan Beban Pemeliharaan	30
	per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	
Tabel 23	: Perbandingan Beban Perjalanan Dinas	31
	per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	
Tabel 24	: Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi	31
	per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	
Tabel 25	: Perbandingan Beban Penisihan Piutang Tak Tertagih per	32
	31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	
Tabel 26	: Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	32
	per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	
Tabel 27	: Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	32
	Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 31 Desember 2017

Kepala,

Dr. Hermansyah ,SH,MM

NIP. 19580917 198303 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.331.618.767,00 atau mencapai 210,91% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 631.350.000,00

Realisasi Belanja Negara pada Semester II Tahun 2017 adalah sebesar Rp 17.103.470.088,00 atau mencapai 98,67 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 17.318384.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp 59.243.547.904,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 2.307.715.806,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 56.571.651.285,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 364.180.813,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 72.710.979,00 dan Rp 59.170.836.925,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.043.775.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 24.891.065.305,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp -23.847.290.305,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp 219.552.997,00 dan Defisit Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp -23.627.737.308,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp 80.028.831.148,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp - 23.627.737.308,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 13.416.743.485,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 16.186.486.570,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp 59.170.836.925,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	631.350.000,00	1.331.618.767,00	210,91	800.369.700,00
Jumlah Pendapatan		631.350.000,00	1.331.618.767,00	210,91	800.369.700,00
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	5.345.001.000,00	5.307.641.514,00		5.402.317.497,00
Belanja Barang	B.2.2	11.461.058.000,00	11.272.760.266,00		8.404.645.207,00
Jumlah Belanja Operasi		16.806.059.000,00	16.580.401.780,00		13.806.962.704,00
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3	346.000.000,00	345.261.000,00		1.164.285.050,00
Belanja Modal Gedung Bangunan	B.2.4	0,00	0,00		1.136.627.170,00
Belanja Modal Jaringan	B.2.5	141.325.000,00	140.723.000,00		0,00
Belanja Penambahan Nilai Aset	B.2.6	25.000.000,00	24.695.000,00		0,00
Jumlah Belanja Modal		512.325.000,00	510.679.000,00		2.300.912.220,00
Jumlah Belanja		17.318.384.000,00	17.091.081.337,00		16.107.874.924,00

Jakarta, 31 Desember 2017
Kepala,

Dr. Hermansyah ,SH,MM
NIP. 19580917 198303 1 001

II. NERACA**BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN
NERACA****PER 30 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	30 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /TGR	C.1.1	0,00	241.822.150,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih TGR	C.1.2	0,00	(1.209.111,00)
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	28.525.000,00	
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	C.1.4	(142.625,00)	
Persediaan	C.1.5	2.292.591.806,00	2.095.076.202
Jumlah Aset Lancar		2.320.974.181,00	2.335.689.241
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	20.490.500.000,00	20.490.500.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	77.901.849.491,00	78.521.952.098,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	19.401.812.000,00	37.283.171.111,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	169.123.000,00	28.400.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0,00	161.645.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	-61.391.633.206,00	-58.725.466.410,00
Jumlah Aset Tetap		56.571.651.285,00	77.760.201.799,00
Aset Lainnya			
Aset tak berwujud	C.3.1	209.495.000,00	0,00
Aset lain-lain	C.3.2	1.549.922.985,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.3	-1.395.237.172,00	0,00
Aset Lainnya		364.180.813,00	0,00
Jumlah Aset		59.256.806.279,00	80.095.891.040,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	72.710.979,00	67.059.892,,00
Uang muka dari KPPN	C.4.2	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		72.710.979,00	67.059.892,,00
Jumlah Kewajiban		72.710.979,00	67.059.892,,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	59.184.095.300,00	80.028.831.148,00
Jumlah Ekuitas		59.256.806.279,00	80.028.831.148,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		59.243.547.904,00	80.095.891.040,00

Jakarta, 31 Desember 2017
Kepala,

Dr. Hermansyah ,SH,MM
NIP. 19580917 198303 1 001

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.045.500.000,00	604.498.100,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.045.500.000,00	604.498.100,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.312.242.810,00	5.402.317.497,00
Beban Persediaan	D.3	1.232.369.226,00	1.464.015.918,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.459.508.039,00	4.768.098.684,00
Beban Pemeliharaan	D.5	2.056.823.689,00	2.101.363.327,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.485.925.436,00	994.138.638,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	8.345.329.216,00	9.242.999.634,00
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	D.8	-1.066.486,00	-1.209.111,00
JUMLAH BEBAN		24.891.131.930,00	23.974.142.809,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-23.845.631.930,00	-23.369.644.709,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	41.121.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	1.008.819.607,00	1.203.667.774,00
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	D.11	818.787.610,00	812.945.650,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		231.152.997,00	419.222.124,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-23.614.478.933,00	-22.950.422.585

Jakarta, 31 Desember 2017
Kepala,

Dr. Hermansyah ,SH,MM
NIP. 19580917 198303 1 001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	80.028.831.148,00	87.406.513.354,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-23.614.478.933,00	-22.950.422.585,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3	0	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR			
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	0	530.108.142,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	13.276.630.097,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	140.113.388,00	-264.872.987,00
Transaksi Antar Entitas	E.7	16.186.486.570,00	15.307.505.224,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-20.844.735.848,00	-7.377.682.206,00
EKUITAS AKHIR		59.184.095.300,00	80.028.831.148,00

Jakarta, 31 Desember 2017
Kepala,

Dr. Hermansyah ,SH,MM
NIP. 19580917 198303 1 001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/ 9/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP), BBUSKP adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian. BBUSKP mempunyai tugas melaksanakan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.

Pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2006 tersebut di atas meliputi antara lain pelayanan uji rujukan, uji konfirmasi hasil pemantauan, bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, bimbingan teknis internal dan eksternal pengujian, jasa informasi, jasa tenaga ahli (diantaranya penyusunan PRA, penyusunan modul pelatihan, penyusunan pedoman juklak/juknis, narasumber, instruktur), magang kepada unit pelaksana teknis operasional karantina pertanian di seluruh Indonesia maupun instansi di luar lingkup karantina pertanian. Disamping itu, BBUSKP membangun jaringan kerja dan kerjasama dengan laboratorium yang terkait pada pengujian penyakit hewan, tumbuhan, dan terhadap bahan tambahan (*food additive*), residu obat hewan (*veterinary drugs*), residu antibiotik, bahan kontaminan (biologi dan kimia), toksin atau organisme penyebab penyakit pada pangan (*disease-causing organisms in food*), serta residu pestisida.

Pelaksanaan tupoksi BBUSKP untuk pelayanan pengujian laboratorium telah menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2008 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP-390-IDN pada tanggal 16 Juni 2008. Untuk menyempurnakan sistem manajemen mutu laboratorium perlu dilakukan harmonisasi terhadap sistem mutu pelayanan sesuai SNI ISO 9001:2008.

Penyempurnaan sistem manajemen mutu pelayanan BBUSKP ini diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem manajemen pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan (*good, clean, and transparent governance*), yang pada akhirnya menjadikan BBUSKP dengan profil yang akuntabel.

Dalam upaya menjadikan BBUSKP sebagai instansi pemerintah yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel yang sinkron dengan tupoksi, maka perlu ditetapkan visi dan misi sebagai arah dan langkah tahapan yang perlu dituangkan dalam kebijakan mutu dan dilaksanakan dalam program BBUSKP serta penetapan sasaran mutu yang pencapaiannya melalui kegiatan tahunan.

Visi BBUSKP:

Menjadi *Pusat Standar Pengujian Penyakit Karantina Yang Terpercaya Tahun 2017*

Motto BBUSKP:

“Hasil Uji Yang Memuaskan, Dengan Prioritas Tepat Dan Teliti” (*Test Inlier, Priority In Precise And Accuracy*)

Misi BBUSKP:

1. Melakukan penyusunan standarisasi laboratorium uji karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
2. Melakukan pengkajian pengembangan kompetensi, teknik dan metoda karantina pertanian dan keamanan hayati;
3. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengujian, dan penerapan pengawasan serta pengendalian sistem manajemen mutu pelayanan karantina dan laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
4. Melakukan kerjasama dan pengembangan jejaring laboratorium uji tingkat nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kompetensi laboratorium sebagai penyedia sampel uji standar (*provider*) dalam pelaksanaan uji profesiensi.

Janji Layanan BBUSKP:

“Memberikan Pelayanan Yang Cepat, Tepat, Akurat, Dan Akuntabel

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a). Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Daftar Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2016 adalah merupakan implementasi yang kedua.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Daftar Perubahan Revisi

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	631.350.000.000,00	631.350.000.000,00
Jumlah Pendapatan	631.350.000,00	631.350.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	5.465.041.000,00	5.345.001.000,00
Belanja Barang	11.904.658.000,00	11.461.058.000,00
Belanja Modal	513.325.000,00	513.325.000,00
Jumlah Belanja	17.882.024.000,00	17.318.384.000,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.331.618.707,00 atau mencapai 210,91% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 631.350.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 4 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung Bangunan	0,00	4.800.000,00	0,00
Pendapatan Pemindatangan BMN	0,00	41.121.000,00	
Pendapatan Jasa	631.350.000,00	1.012.175.000,00	160,31
Pendapatan Pelunasan Piutang TGR Non Bendahara	0,00	241.822.150,00	0,00
Pendapatan Belanja Pegawai TAYL	0,00	31.700.617,00	0,00
Jumlah	631.350.000,00	1.331.618.767,00	210,91

Realisasi Pendapatan Semester II 2017 mengalami kenaikan sebesar 66,37 % dibandingkan TA 2016. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	41.121.000,00	28.500.000,00	44,29
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung Bagunan	4.800.000,00	1.200.000,00	300,00
Pendapatan Jasa	1.012.175.000,00	561.657.000,00	80,21
Pendapatan Denda	0,00	1.141.100,00	-100,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	40.500.000,00	-100,00
Pendapatan Pelunasan Piutang TGR Non Bendahara	241.822.150,00	167.371.600,00	100,00
Pendapatan Belanja Pegawai TAYL	31.700.617,00	0,00	100,00
Jumlah	1.331.618.767,00	800.369.700,00	66,38

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada Semester II 2017 adalah sebesar Rp 17.103.470.088,00 atau 98,76 % dari anggaran belanja sebesar Rp 17.318.384.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 : Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	2017			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		5.345.001.000,00	5.317.021.822,00	99,48
Belanja Barang		11.461.058.000,00	11.275.869.266,00	98,38
Belanja Modal		513.325.000,00	510.679.000,00	99,68
Total Belanja Kotor		17.318.384.000,00	17.103.470.088,00	98,76
Pengembalian Belanja			12.388.751,00	0,00
Total Belanja		17.318.384.000,00	17.091.081.337,00	98,69

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja Semester II TA 2017 mengalami penurunan sebesar 6,18 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Belanja Pegawai	5.317.021.822,00	5.402.317.497,00	-1,57
Belanja Barang	11.275.869.266,00	8.404.645.207,00	34,16
Belanja Modal	510.679.000,00	2.300.912.220,00	-77,80

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Belanja Pegawai	5.317.021.822,00	5.402.317.497,00	-1,57
Total Belanja	17.103.470.088,00	16.107.874.924,00	6,18

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 5.317.021.822,00 dan Rp 5.402.317.497,00. Realisasi belanja Semester II TA 2017 mengalami penurunan sebesar 1,75 % dari TA 2016.

Tabel 8 : Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.037.260.822,00	5.216.204.389,00	-3,43
Belanja Lembur	279.761.000,00	187.764.000,00	48,99
Jumlah Belanja Kotor	5.317.021.822,00	5.403.968.389,00	-1,60
Pengembalian Belanja Pegawai	9.380.308.00	1.650.892,00	468,19
Jumlah Belanja	5.307.641.514,00	5.402.317.497,00	-1,75

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 11.275.865.266,00 dan Rp 8.404.645.207,00 Realisasi belanja barang Semester II TA 2017 mengalami kenaikan secara keseluruhan sebesar 34,12 % dibandingkan Realisasi belanja barang Tahun 2016.

Tabel 9 :Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.226.591.814,00	1.328.574.425,00	-7.68
Belanja Barang Non Operasional	2.640.280.984,00	1.055.197.232,00	150,22
Belanja Barang Persediaan	1.271.553.450,00	1.058.407.780,00	20.14
Belanja Jasa	2.591.585.450,00	2.360.002.925,00	9.82

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Pemeliharaan	2.056.823.689,00	1.609.324.207,00	27.81
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.488.933.879,00	995.506.638,00	49.57
Jumlah Belanja Kotor	11.275.869.266,00	8.407.013.207,00	34.13
Pengembalian Belanja Barang	3.008.443,00	-2.368.000,00	-100,00
Jumlah Belanja	11.272.860.823,00	8.404.645.207,00	-34.17

B.2.3 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 345.261.000 dan Rp. 1.164.285.000,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami penurunan sebesar 70,35 % dibandingkan TA 2016

Tabel 10 :Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	345.261.000,00	1.164.285.000,00	-70,35
Jumlah Belanja Kotor	345.261.000,00	1.164.285.000,00	-70,35
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	-70,35
Jumlah Belanja	345.261.000,00	1.164.285.000,00	-70,35

B.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar 140.723.000,00 dan Rp 1.136.627.170,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami penurunan sebesar 87,62 % dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan di TA.2016 adanya penghematan anggaran.

Tabel 11 : Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.723.000,00	1.136.627.170,00	-87,620
Jumlah Belanja Kotor	140.723.000,00	1.136.627.170,00	-87,620
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	-87,62
Jumlah Belanja	140.723.000,00	1.136.627.170,00	-87,62

B.2.5 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 24.695.000,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 100 % dibandingkan TA 2016.

Tabel 12 : Perbandingan Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	24.695.000,00	0,00	100,00
Jumlah Belanja Kotor	24.695.000,00	0,00	100,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	100,00
Jumlah Belanja	24.695.000,00	0,00	100,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TGR

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 241.822.150,00. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan ini adalah temuan Inspektorat Jendral dengan nomor B.086/PW130/G.5/04/2016 Tanggal 15 April 2016 atas kelebihan pembayaran rehabilitasi gedung laboratorium karantina tumbuhan. Rincian Pembayaran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan ini sejumlah Rp. 391.822.150,00 adalah sebagai berikut :

1. Rp. 50.000.000,- NTPN 76AE703V5TKLUPAP, NTB 000000644479
2. Rp. 100.000.000,- NTPN F4EE7MMA514229, NTB 000000433529
3. Rp. 20.000.000,- NTPN 0DC092648EBR83F9, NTB 000000303573
4. Rp. 20.000.000,- NTPN 0B5764E3TO3RGQA9, NTB 000000320062
5. Rp. 50.000.000,- NTPN 94F436H7VOD17U6P, NTB 000000404436
6. Rp. 50.000.000,- NTPN 11B4C0KFHG8QUDFO, NTB 000000243711
7. Rp. 100.000.000,- NTPN 71B388O7GT1H5BFP, NTB 000000563426
8. Rp. 1.822.150,- NTPN 945E93GSO104UCP9, NTB 000000092716

C.1.2 PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 142.625,00 dan Rp. 1.209.111,00. Penyisihan piutang tak tertagih ini merupakan penyisihan piutang tak tertagih dari piutang bukan pajak.

C.1.3 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 2.292.591.806,00 dan Rp 2.095.076.202,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 : Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	2.292.591.806,00	1.003.480.946,00
Suku Cadang	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	1.091.595.256,00
Jumlah	2.292.591.806,00	2.095.076.202,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 20.490.500.000,00 dan Rp 20.490.500.000,00.

Tabel 14 : Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	3.830,00m2	Jl. Pemuda No. 64 Kav 16-17 Rt., Pulo gadung	20.490.500.000,00
Jumlah			20.490.500.000,00

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Oktober 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 77.901.849.491,00 dan Rp 78.521.952.098,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	78.521.952.098,00
Mutasi Tambah	
Saldo awal	180.690.378,00
Pembelian	266.721.000,00
Pengembangan Nilai Aset	78.540.000,00
Transfer Masuk	427.024.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	-1.388.277.985
Reklasifikasi Keluar (software komputer)	-184.800.000
Saldo per 31 Desember 2017	77.901.849.491,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-61.150.005.495,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	16.751.843.996,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa :

1. Rp. 65.615.000 ,- Pengadaan Alat Pengolah Data sebanyak 10 unit
2. Rp. 78.540.000,- Pengadaan Sparepart Lift sebanyak 1 Paket
3. Rp. 62.975.000,- Pengadaan UPS sebanyak 1 unit
4. Rp. 35.750.000,- Pengadaan Peralatan Penunjang Laboratorium sebanyak 1 Unit
5. Rp. 98.956.000,- Pengadaan CCTV sebanyak 1 Paket
6. Transfer Masuk Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 1 unit
7. Rp. 1.388.277.985,- Reklasifikasi Aset tetap ke Aset lainnya (daftar reklas terlampir)
8. Rp. 184.800.000,- Reklasifikasi Peralatan Mesin ke aset lain-lain

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.19.401.812.000,00 dan Rp.37.283.171.111,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	37.283.171.111,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	,00
Pengembangan Nilai Asset	,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai	419.262.528,00
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	13.276.630.097,00
Uraian Transaksi Tidak Ada	4.185.466.486,00
Saldo per 31 Desember 2017	19.401.812.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	-231.630.734,00
Nilai Buku per 31 Desember 2016	19.170.181.266,00

Koreksi Pencatatan Nilai sebanyak Rp. 241.822.150,00 adalah Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jendral Kementran Pertanian dengan nomor LHP B.086/PW130/G.5/04/2016 Tanggal 15 April 2016 yaitu Pengembalian atas kelebihan pembayaran rehabilitasi gedung laboratorium karantina tumbuhan dengan 4 kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp. 20.000.000,- NTPN 0DC092648EBR83F9, NTB 000000303573
2. Rp. 20.000.000,- NTPN 0B5764E3TO3RGQA9, NTB 000000320062
3. Rp. 50.000.000,- NTPN 94F436H7VOD17U6P, NTB 000000404436
4. Rp. 50.000.000,- NTPN 11B4C0KFHG8QUDFO, NTB 000000243711

5. Rp. 100.000.000,- NTPN 71B388O7GT1H5BFP, NTB 000000563426

6. Rp. 1.822.150,- NTPN 945E93GSO104UCP9, NTB 000000092716

Koreksi Pencataan Nilai lainnya senilai Rp. 177.440.378 adalah Koreksi Pengurangan nilai Rehabilitasi Gedung Laboratorium Karantina Tumbuhan.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 169.123.000,00 dan Rp 28.400.000,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	28.400.000,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	140.723.000,00
Saldo per 31 Desember 2017	169.123.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-9.996.977,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	159.126.023,00

Mutasi Tambah senilai Rp. 140.723.000,- adalah Pengadaan Penataan Jaringan Listrik Gedung Laboratorium Karantina Tumbuhan.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp161.645.000,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	161.645.000,00
Mutasi Kurang	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-161.645.000,00
Saldo per 31 Desember 2017	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	0,00

Mutasi transaksi pada mutasi kurang merupakan penghentian aset dari penggunaan yang menyebabkan saldo pada bulan Juni adalah Rp. 0,00, pada Aset ini sudah diajukan usulan penghapusan dan sedang menunggu proses selanjutnya.

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 56.571.651.285,00 dan Rp -58.725.466.410,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	77.901.849.491,00	-61.150.005.495,00	16.751.843.996,00
2.	Gedung dan Bangunan	19.401.812.000,00	-231.630.734,00	19.170.181.266,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	169.123.000,00	-9.996.977,00	159.126.023,00
Akumulasi Penyusutan		117.963.284.491,00	-61.391.633.206,00	56.571.651.285,00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.549.922.985,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	0,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.388.277.985,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	161.645.000,00
Saldo per 31 Desember 2017	1.549.922.985,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-1.367.419.295,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	182.503.690,00

Mutasi Tambah senilai Rp. 1.388.277.985 merupakan reklasifikasi dari Peralatan Mesin ke Aset lain-lain dan sejumlah Rp. 161.645.000,- merupakan reklasifikasi dari aset tetap lainnya menjadi aset lain-lain sesuai dengan daftar terlampir.

C.3.2 ASET TAK BERWUJUD

Nilai Aset Tak Berwujud yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 209.495.000,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	0,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	184.800.000,00
Pembelian	24.695.000,00
Saldo per 31 Desember 2017	209.495.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	209.495.000,00

C.3.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-1.395.237.172,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	1.549.922.985,00	-1.369.050.297,00	180.872.688,00
2.	Aset Tak Berwujud	209.495.000,00	26.186.875,00	183.308.125,00
	Akumulasi Penyusutan	1.759.417.985,00	-1.395.237.172,00	364.180.813,00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.72.710.979 dan Rp 67.059.892,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada PT.PLN dan para pegawai per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 17 : Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
PT.PLN (tagihan listrik bulan Desember 2017)	68.109.683,00	67.059.892,00
Para Pegawai	4.601.296,00	0,00
Jumlah	72.710.979,00	67.059.892,00

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 59.184.095.300,00 dan Rp 80.028.831.148,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 1.045.500.000,00 dan Rp 894.605.617,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 18 : Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan	4.800.000,00	2.800.000,00	300,00
Pendapatan Denda keterlambatan	0,00	1.141.100	100,00
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/ Pemeriksaan	1.040.700.000,00	561.657.000,00	85,29
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	40.500.000,00	100,00
Jumlah	1.045.500.000,00	894.605.617,00	72,95

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 5.312.242.810,00 dan Rp 5.402.317.497,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 19 : Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	3.565.387.500,00	3.648.814.000,00	-2,28,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	44.895,00	48.736,00	-7,88,00
Beban Tunj. Anak PNS	222.849.720,00	71.175.204,00	-1,99,00
Beban Tunj. Beras PNS	191.202.180,00	198.627.320,00	-3,73,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	365.560.000,00	392.095.000,00	-6,76,00
Beban Tunj. PPh PNS	22.674.947,00	56.764.369,00	-60,05,00
Beban Tunj. Struktural PNS	111.660.000,00	109.365.000,00	2,09,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	222.849.720,00	223.852.230,00	-0,44,00
Beban Tunjangan Umum PNS	51.135.000,00	59.939.638,00	-14,68,00
Beban Uang Lembur	279.761.000,00	187.764.000,00	48,99,00

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	3.565.387.500,00	3.648.814.000,00	-2,28,00
Beban Uang Makan PNS	432.209.000,00	453.872.000,00	-4,77,00
Jumlah	5.312.242.810,00	5.402.317.497,00	-51,53,00

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 1.232.369.226,00 dan Rp 1.464.015.918,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 : Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	902.501.160,00	1.280.403.480,00	391,52,00
Beban Persediaan konsumsi	329.868.066,00	183.612.438,00	-74,23,00
Jumlah	1.232.369.226,00	1.464.015.918,00	317,28,00

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.6.459.508.039,00 dan Rp 4.768.098.684,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Bahan	2.630.980.984,00	1.323.074.425,00	98,95,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	4.500.000,00	-100,00,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	168.960.000,00	114.660.000,00	0,00,00
Beban Jasa Lainnya	1.021.788.908,00	938.680.909,00	8,85,00
Beban Jasa Profesi	506.700.000,00	361.800.000,00	40,04,00
Beban Keperluan Perkantoran	799.811.114,00	610.925.742,00	30,91,00
Beban Langganan Air	62.999.930,00	56.489.040,00	11,52,00

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Bahan	2.630.980.984,00	1.323.074.425,00	98.95,00
Beban Langganan Listrik	828.393.010,00	862.342.068,00	-3.93,00
Beban Langganan Telepon	63.453.393,00	66.747.010,00	-4.93,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	237.572.700,00	217.483.500,00	9.23,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.248.000,00	13.127.990,00	54.23,00
Beban Sewa	109.300.000,00	98.268.000,00	11.22,00
Beban Aset Ekstrakomtable	0,00	1.000.000,00	
Beban barang Operasional Lainnya	0,00	99.000.000,00	
Jumlah	6.459.508.039,00	5.211.619.752,00	3.38,00

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp, 2.056.823.689,00 dan Rp 2.101.363.327,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 : Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	870.748.248,00	582.773.767,00	49.41,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.116.077.140,00	975.438.140,00	14.41,00
Beban Persediaan suku cadang	0,00	492.039.120,00	-100,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	69.998.301,00	51.112.300,00	
Jumlah	2.056.823.689,00	2.101.363.327,00	0.78,00

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.1.485.925.436,00

dan Rp 1.056.149.172,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 : Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	984.414.484,00	698.464.859,00	40.93,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.600.000,00	49.140.000,00	-31.62,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	71.100.000,00	2.080.000,00	3.318,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	396.810.952,00	244.453.779,00	62.32,00
Jumlah	1.485.925.436,00	994.138.638,00	3.389,91

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp,8.345.329.216,00 dan Rp 9.242.999.634,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 : Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	617.209.792,00	767.483.094,00	-19.58,00
Beban Penyusutan Jaringan	4.394.919,00	875.345,00	402.07,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.671.175.626,00	8.474.641.195,00	-9.48,00
Beban Amortisasi Software	49.286.875,00	0,00	0,00
Beban penyusutan aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	3.262.004,00	0,00	0,00
Jumlah	8.345.329.216,00	9.242.999.634,00	373.01

D.8 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Jumlah Beban Penyisihan piutang tak tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar - Rp. 1.066.486,00 dan Rp 1.209.111,00. Beban penyisihan Piutang tak tertagih adalah merupakan beban untuk mencatat besarnya penyisihan piutang yang tak tertagih sesuai dengan tarif/ besaran yang telah ditentukan dari Piutang tersebut. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 : Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyisihan Piutang PNBP	142.625,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Tuntutan anti Rugi	-1.209.111,00	1.209.111,00	-200,00
Jumlah	1.066.486,00	1.209.111,00	-200,00

D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi

entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 : Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	41.121.000,00	28.500.000,00	44.28
Jumlah	41.121.000,00	28.500.000,00	44.28

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 : Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan dari Pelunasan Piutang Non Bendahara	0	409.193.750,00	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	31.700.617,00	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	977.118.990	794.474.024,00	-22.98
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	818.787.610,00	812.945.650	0.71
Jumlah	231.152.997,00	419.222.124,00	32.00

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.80.028.831.148,00 dan Rp. 87.406.513.354,00

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp -23.614.478.933,00 dan Rp --22.950.422.585,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan koreksi atas nilai aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian aset yang terjadi pada periode tahun berjalan. Penyesuaian Nilai Aset untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0.

E.4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan adalah hasil yang terjadi akibat adanya perubahan harga/penyesuaian harga pada Persediaan yang terjadi pada periode tahun berjalan. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 530.108.142,00.

E.5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih atas revaluasi gedung dan bangunan sesuai dengan BA Nomor BAR-IP0308/WKN.07/KNL.02/2017 Tanggal 3 Januari 2018, dengan rincian terlampir, saldo untuk periode 30 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 13.276.630.097,00 dan Rp 0,00.

E.6 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar - Rp. 140.113.388 ,00 dan Rp -264.872.987,00.

E.7 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi antar entitas untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.186.486.570 dan Rp. 15.307.505.224,-

E.8 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 59.184.095.300,00 dan Rp. 80.028.831.148,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah :
 - Bank BNI Cabang Rawamangun No.Rek 0012957783 a.n. Bendahara Pengeluaran Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian
 - Bank Mandiri KCP Rawamangun Balai Pustaka No.Rek 006-00-0688876-6 a.n. Bendahara Penerimaan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, namun sejak bulan September 2015, rekening tersebut telah di tutup dikarenakan bahwa setiap satker yang menyetor jasa pengujian bisa dilakukan dengan kode billing dan tidak lagi disetor melalui rekening bendahara penerima.
2. Selama tahun 2016 telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 3 kali revisi, dan mendapatkan pemotongan Anggaran sebesar Rp. 563.640.000,-
3. Berdasarkan Hasil Audit Tim Inspektorat Jendral Kementrian Pertanian pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian sesuai surat tugas Inspektur IV Nomor B.086/PW.130/G.5/04/2016 Tanggal 15 April 2016 ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 409.193.750,- (*Empat ratus sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Seluruh TGR tersebut telah dilunasi oleh Pihak ke 3 dan sudah dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lunas yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.